

Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas

Oleh : Ridha Aida

Abstract

Nowadays, liberalism and communitarianism are the most famous mainstreams in political philosophy discourses. These mainstreams are mutual different, especially in individual and community freedom concepts. Liberalism gives priority to individual freedom, whereas communitarianism gives priority to community.

Kata Kunci: *liberalisme, komunitariasme, kebebasan individu, komunitas*

I. PENDAHULUAN

Cakrawala politik dalam gambaran tradisional terbagi atas dua kubu, yaitu liberalisme dan sosialisme. Liberalisme menonjolkan ide kebebasan (*liberty*) dan sosialisme dengan ide kesamaan (*equality*). Sesuai dengan perkembangan, aliran filsafat politik saat ini tidak dapat direduksi sebatas dua ide pokok tersebut. Masing-masing aliran memiliki dan mengemukakan ide-ide tersendiri seperti kesepakatan kontrak (John Rawls), kebaikan umum (komunitarianisme), kemanfaatan (utilitarianisme), hak (Dworkin) dan androgini (feminisme).

Di antara berbagai aliran tersebut, ada dua aliran filsafat politik yang menarik untuk dicermati saat ini, yaitu liberalisme dan komunitarianisme. Runtuhnya Uni Sovyet dan negara-negara lain penganut sosialisme dan marxisme, menjadikan liberalisme sebagai salah satu paham yang sangat diminati. Liberalisme dinilai ampuh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1970-an muncul suatu aliran filsafat politik yang merupakan kritik terhadap liberalisme, yaitu komunitarianisme. Topik yang menjadi perdebatan kedua aliran ini adalah eksistensi individu dan komunitas.

II. LIBERALISME

Sejarah liberalisme dimulai dari zaman Renaissance, sebagai reaksi terhadap ortodoksi religius. Saat itu kekuasaan gereja mendominasi

seluruh aspek kehidupan manusia. Semua aturan kehidupan ditentukan dan berada di bawah otonomi gereja. Hasilnya, manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, otonomi individu dibatasi dan bahkan ditiadakan. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, yang menginginkan otonomi individu dalam setiap tindakan dan pilihan hidup. Otonomi individu dipahami sebagai keterbebasan dari determinasi dan intervensi eksternal, berupa pembatasan, pemaksaan atau berbagai bentuk ancaman dan manipulasi, dalam melakukan tindakan. Menurut liberalisme, individu adalah pencipta dan penentu tindakannya. Dengan konsep seperti ini, maka kesuksesan dan kegagalan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh tindakan-tindakannya dan pilihan-pilihan terhadap tindakan tersebut. Intinya, manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya, manusia adalah pribadi yang otonom.

Dalam perkembangannya, ada dua corak liberalisme, liberalisme yang dipelopori oleh John Locke dan liberalisme yang dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat. Karenanya, pemerintah bersifat terbatas (minimal) terhadap kehidupan warganya. Untuk itu harus ada aturan hukum yang jelas dan lengkap dalam menjamin kebebasan sebagai hak properti privat ini. Corak liberalisme ini kemudian mendasari dan menginspirasi munculnya libertarianisme yang dipelopori oleh Alexis de Tocqueville, Friedrich von Hayek dan Robert Nozick.

Di sisi lain Rousseau berpendapat bahwa pemerintah harus tetap berfungsi menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam masyarakat. Corak liberalisme ini selanjutnya mendasari dan menginspirasi munculnya liberalisme egalitarian, dengan tokohnya antara lain John Rawls dan Ronald Dworkin. Liberalisme ini berusaha menyatukan ide kebebasan dan kesamaan individu dalam masyarakat. Pemerintah dibutuhkan untuk meredistribusikan nilai-nilai sosial dalam melaksanakan dan mencapai kebebasan dan kesamaan individu-individu dalam masyarakat.

Perbedaan terpenting antara liberalisme dan libertarianisme adalah pandangan tentang kebebasan individu. Menurut libertarianisme, kebebasan yang menjadi hak individu merupakan satu bentuk properti privat, tidak seorang pun atau apa pun yang dapat merampas dan mencabutnya dari seseorang tanpa dianggap telah melanggar hak orang tersebut. Seperti libertarianisme, liberalisme juga mengutamakan kebebasan. Kebebasan menurut

liberalisme tidak dapat dikorbankan untuk nilai yang lain, untuk nilai ekonomi, sosial dan politik. Kebebasan hanya dapat dibatasi dan dikompromikan ketika ia konflik dengan kebebasan dasar yang lain yang lebih luas. Karenanya, kebebasan menurut liberalisme bukan sesuatu yang absolut, kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Konsep otonomi individu dalam pandangan liberalisme tidak hanya berupa kebebasan individu dalam bertindak dan memilih cara hidup yang baik. Namun, juga untuk mengkritisi, merevisi dan bahkan meninggalkan nilai dan cara hidup yang telah dipilihnya. Karena menurut liberalisme, siapa pun dapat keliru dalam pilihan hidupnya. Tindakan seperti ini bebas dilakukan oleh siapa pun jika nilai dan pilihan hidupnya semula tidak lagi tampak berharga untuk dikejar dan tidak lagi sesuai dengan nilai yang mereka yakini saat ini. Dengan demikian, otonomi individu tidak harus ditundukkan oleh keanggotaannya pada suatu kelompok, seperti kelompok agama, etnis dan sebagainya. Mereka bebas untuk tetap berada atau menarik diri dari kelompoknya.

Setiap orang bebas memilih konsep tentang hidup yang baik, meskipun sangat berbeda dengan nilai dan pilihan hidup anggota komunitas yang lain. Namun, konsep tersebut tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Orang-orang dengan konsep hidup yang berbeda-beda akan saling menghormati, bukan karena hal ini mempromosikan satu cara hidup bersama. Namun, karena mereka mengakui bahwa tiap-tiap orang memiliki klaim pertimbangan yang sama. Tidak ada tugas khusus yang ditetapkan komunitas terhadap individu. Tidak ada kelompok atau praktek sosial tertentu yang memiliki kewenangan di luar penilaian dan kemungkinan penolakan individu. Tidak ada yang “ditetapkan untuk seseorang” atau tidak ada yang berwenang memberikan penilaian terhadap seseorang selain nilai yang ditetapkan oleh orang tersebut.

Pengakuan terhadap otonomi atau kebebasan individu dalam bertindak mengindikasikan adanya pengakuan terhadap pluralitas dalam masyarakat. Kebebasan dan kesamaan perlakuan terhadap individu dalam bertindak dan memilih cara hidup akan menghasilkan pluralitas nilai dan pilihan hidup. Setiap orang bebas untuk bertindak dan memilih cara hidup yang baik menurutnya. Pengakuan terhadap pluralitas tindakan dan pilihan hidup mendapat perlakuan yang sama. Untuk menjamin tercapainya kesamaan perlakuan tersebut, maka liberalisme mengemukakan ide netralitas negara.

Pemerintah menurut liberalisme harus bersikap netral terhadap konsep apa pun tentang hidup yang baik, yang dianut dan

dipilih oleh warganya. Pemerintah tidak boleh memberikan prioritas pada satu nilai di atas nilai yang lain, atau tidak menyokong dan mengabaikan salah satu nilai yang ada. Liberalisme menganggap bahwa intervensi pemerintah untuk menyokong salah satu nilai atau pilihan hidup dan mengabaikan nilai atau pilihan hidup yang lain, melanggar dan membatasi otonomi individu, yang menjadi nilai liberalisme.

Ide netralitas negara tidak membenarkan adanya tindakan atas dasar superioritas atau inferioritas intrinsik dari berbagai konsep tentang kehidupan yang baik. Tidak boleh ada tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja berusaha mempengaruhi penilaian-penilaian orang tentang nilai dari berbagai konsep yang berbeda ini. Kebebasan sebagai nilai yang esensial dalam kehidupan manusia akan terancam dengan adanya pemaksaan suatu pandangan khusus tentang kehidupan yang baik pada setiap orang.

Netralitas negara yang bertujuan untuk menjamin kebebasan dan kesamaan individu dalam masyarakat, dengan sendirinya mendorong berkembangnya cara hidup yang bernilai dan mendorong tersingkirnya cara-cara hidup yang tidak bernilai. Netralitas negara terhadap pluralitas nilai tersebut dengan sendirinya menyeleksi nilai-nilai yang ada, mana yang tetap bertahan dan diminati banyak orang atau tersingkir karena tidak menarik minat orang.

Kegagalan sosialisme dan marxisme dalam mengatasi konflik pada masyarakat seperti terlihat di Uni Sovyet dan negara-negara lain di dunia menjadikan liberalisme sebagai konsep yang dominan saat ini. Namun, ini tidak berarti liberalisme menjadi satu ideologi yang tanpa cacat. Cacat inilah yang dilihat oleh komunitarianisme dan memunculkannya dalam bentuk kritik terhadap liberalisme. Komunitarianisme mengkritik nilai-nilai liberalisme yang dianggap tidak sensitif terhadap keanggotaan pada satu kelompok, terutama kelompok kultural, yang menjadi perdebatan sengit dalam filsafat politik saat ini.

III. KOMUNITARIANISME

Sejak tahun 1970an ada satu perkembangan dalam filsafat politik, ditandai dengan munculnya komunitarianisme, yang mengutamakan nilai komunitas dan mengkritik individualisme liberalisme. Menurut mereka, otonomi individu yang ditonjolkan liberalisme bersifat atomistik dan transenden. Liberalisme yang mereka kritik terutama adalah liberalisme egalitarian yang dikemukakan oleh Rawls dan

Dworkin. Sedangkan fokus dari kritik mereka adalah otonomi individu, netralitas negara dan universalisme.

Komunitarianisme berbeda dengan sosialisme dan marxisme. Jika marxisme melihat masyarakat sebagai sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui suatu perubahan revolusioner pada masyarakat, dengan penggulingan kapitalisme dan menggantinya dengan masyarakat tanpa kelas atau dalam bentuk masyarakat sosialis. Komunitarianisme justru menganggap bahwa masyarakat sudah ada, dalam bentuk tradisi-tradisi kultural, praktek-praktek dan pemahaman sosial bersama. Masyarakat tidak perlu didirikan lagi, tapi lebih butuh untuk diakui, dihargai dan dilindungi, dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompok. Bagi komunitarianisme, masyarakat adalah satu masyarakat yang sama dan bebas.

Ada dua pandangan yang dikemukakan tentang komunitarianisme. Pertama, sebagai pandangan positif, komunitarianisme dinilai sebagai salah satu perspektif dalam filsafat politik yang menekankan nilai etis dan psikologis sosial dari anggota-anggota komunitas. Justifikasi dari pertimbangan etika ditentukan oleh fakta-fakta yang berada dalam konteks pemahaman kultural dan tradisi-tradisi komunitas. Kedua, sebagai pandangan negatif, komunitarianisme dinilai sebagai anti liberalisme. Ia merupakan kritik terhadap nilai-nilai liberalisme.

Komunitarianisme menekankan ketergantungan dan keterikatan individu pada komunitasnya. Karenanya, liberalisme dengan otonomi individunya dinilai menjadikan manusia transenden, terlepas dan terpisah dari keberadaan komunitasnya. Yang termasuk tokoh komunitarianisme antara lain Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair Mac Intyre dan Charles Taylor. Menurut komunitarianisme, individu tertanam atau melekat pada praktek-praktek sosial. Setiap orang tidak selalu dapat mengambil jarak atau melepaskan diri dari berbagai praktek sosial tersebut.

Mac Intyre mengatakan bahwa dalam memutuskan bagaimana menjalankan kehidupannya, “semua mendekati keadaan sekitar dirinya sendiri sebagai pembawa identitas sosial tertentu. Apa yang baik bagi saya harus juga baik bagi orang-orang yang menduduki peranan-peranan ini” Karenanya, penentuan diri sendiri dan pilihan-pilihan tentang hidup yang baik dilakukan dalam berbagai peranan sosial ini.

Secara khusus komunitarianisme menyatakan bahwa liberalisme telah salah dalam memahami kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka dianggap mengabaikan

pra kondisi-pra kondisi sosial yang memungkinkan kemampuan itu dapat dijalankan dengan penuh makna. Dua pra kondisi yang harus diperhatikan untuk mengarahkan sebuah kehidupan yang baik yaitu kondisi dari dalam, berupa keputusan yang dilakukan terhadap pilihan-pilihan yang sesuai dengan kepercayaan tentang apa yang memberi nilai yang baik. Kedua adalah kondisi dari luar, yaitu nilai-nilai dan informasi-informasi yang diberikan oleh komunitas tentang hidup yang baik.

Menurut Taylor, nilai individualisme liberal bersifat atomistik, yang menganggap individu bisa mencukupi diri mereka sendiri di luar masyarakat. Individu menurut liberalisme tidak memerlukan konteks komunitas untuk mengembangkan dan menjalankan kapasitas mereka dalam menentukan dirinya sendiri. Menurut Taylor, kapasitas individu untuk menentukan dan mengembangkan dirinya sendiri justru dapat dijalankan hanya dalam konteks komunitas tertentu, dengan lingkungan sosial tertentu.

Liberalisme dianggap mengabaikan keterikatan individu dalam berbagai peranan sosialnya. Padahal, sebagai “makhluk yang menafsirkan dirinya” manusia dapat menginterpretasikan makna dari pembentuk keterlekatan dirinya tersebut. Siapa pun tidak memiliki ataupun menolak berbagai keterlekatan sosial, justru manusia menemukan dirinya sendiri di dalamnya. Nilai-nilai kelompok tidak hanya ditegaskan oleh anggota-anggota kelompok, tapi juga ikut menentukan identitasnya. Pengejaran bersama atas sebuah tujuan masyarakat bukan merupakan “satu hubungan yang dapat dipilih, seperti pada asosiasi sukarela, tapi sebuah keterlekatan yang ditemukan, bukan hanya sebuah ciri tapi merupakan unsur pokok dari identitasnya.

Komunitarianisme mengemukakan kebaikan bersama sebagai satu konsepsi mendasar tentang kehidupan yang baik, yang menentukan pandangan hidup komunitas. Kebaikan bersama ini akan menyatukan atau menjadi ukuran, untuk selanjutnya mengevaluasi berbagai pola preferensi anggota-anggota kelompok. Pandangan hidup komunitas mendasari tatanan publik mengenai berbagai konsepsi tentang yang baik. Bobot yang diberikan pada preferensi individu bergantung pada seberapa besar ia menyesuaikan dengan dan memberikan sumbangan pada kebaikan bersama ini.

Komunitarianisme mendorong orang untuk menerima konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan mencegah berbagai konsep tentang kebaikan yang

bertentangan dengan pandangan hidup komunitas tersebut. Komunitarianisme menjadikan nilai-nilai komunitas sebagai otoritas horison yang menetapkan tujuan hidup bagi manusia. Ada praktek-praktek komunitas tertentu yang dapat didukung oleh setiap orang sebagai basis dari sebuah politik kebaikan bersama.

Komunitarianisme tidak langsung mengkritik otonomi individu dalam liberalisme, tapi lebih kepada pengabaian terhadap kondisi-kondisi sosial yang diperlukan untuk melatih otonomi tersebut. Padahal otonomi individu menurut mereka hanya dapat dilatih dan dikembangkan pada satu jenis lingkungan tertentu. Untuk otonom atau bebas dalam bertindak, seorang individu harus memiliki beberapa pilihan hidup, dan pilihan hidup ini disediakan oleh komunitasnya. Karena itu, pemerintah harus intervensi untuk menyediakan atau menyokong komunitas yang menyediakan pilihan-pilihan hidup yang memadai, agar otonomi individu dapat terlaksana.

Tuntutan agar pemerintah intervensi dalam menyediakan dan menyokong komunitas yang memberikan pilihan-pilihan hidup yang memadai, membuat komunitarianisme menentang netralitas negara. Menurut mereka, negara harus menyokong konsep-konsep bersama dalam masyarakat dan meniadakan konsep-konsep yang konflik dengannya. Netralitas negara harus ditinggalkan demi politik kebaikan bersama. Netralitas negara tidak dapat menyediakan atau melindungi secara memadai lingkungan sosial yang diperlukan untuk penentuan diri sendiri. Kapasitas untuk memilih konsep kebaikan hanya dapat dijalankan pada satu jenis komunitas tertentu. Dan jenis komunitas seperti ini hanya dapat dipertahankan dengan sebuah politik kebaikan bersama.

Komunitarianisme juga mengkritik universalisme liberalisme. Menurut liberalisme, kebebasan dan kesamaan adalah nilai yang diinginkan dan dikejar oleh setiap orang di setiap tempat dan setiap waktu. Konsep kebaikan dan keadilan yang memadai menurut liberalisme adalah yang memperhatikan nilai kebebasan dan kesamaan individu dalam komunitas. Menurut komunitarianisme sebaliknya, satu komunitas dikatakan adil jika ia bertindak sesuai dengan pemahaman bersama dari anggota-anggotanya. Karenanya, ada pluralisme nilai yang dianut oleh komunitarianisme. Kriteria terhadap satu nilai yang dianggap layak untuk dikejar dan dicapai tergantung pada waktu dan tempat, sesuai dengan kebaikan bersama atau kesepakatan yang dimiliki oleh komunitas tersebut.

IV. PENUTUP

Konsep individualisme liberalisme bertujuan untuk menjadikan individu sebagai fokus atau subjek perhatian. Individu merupakan aspek pokok yang harus diperhatikan keberadaannya. Meskipun individu-individu membentuk atau berada pada satu komunitas, namun eksistensinya tidak dapat direduksi atau diabaikan demi nilai individu-individu yang lainnya atau nilai komunitas secara keseluruhan. Karenanya, liberalisme sangat menekankan nilai kebebasan yang akan menghasilkan otonomi pada individu. Individu yang otonom akan bertindak dan memilih cara hidup yang baik sesuai dengan keyakinan dalam dirinya, tanpa intervensi dari luar. Namun, konsep kebebasan ini di sisi lain dapat menimbulkan keegoisan dan meniadakan solidaritas di antara individu dalam komunitas. Masing-masing hanya memikirkan kebebasan yang dimilikinya, sehingga sering tidak peduli atau memikirkan keadaan dari individu-individu yang lain dalam komunitas .

Penekanan pada konsep kebebasan bagi setiap individu menghendaki konsep kesamaan. Kebebasan dimiliki secara sama oleh setiap individu. Setiap individu berhak untuk perlakuan yang sama dalam kebebasannya. Konsep kesamaan ini selanjutnya menghendaki netralitas pemerintah terhadap warga-warganya. Pemerintah tidak boleh intervensi, baik dalam bentuk dukungan atau pengabaian, terhadap salah satu nilai yang dianut oleh warganya.

Di satu sisi, netralitas pemerintah dapat menjamin bahwa tidak satu pun nilai-nilai yang dianut akan didiskriminasi dalam pelaksanaannya, semuanya diperlakukan secara sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun, di sisi lain, netralitas pemerintah justru akan menimbulkan ketimpangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang maju dan subur semakin diminati dan berkembang pesat. Sementara nilai-nilai yang tidak maju dan terkebelakang semakin tidak berkembang dan ditinggalkan karena tidak menarik minat orang. Padahal, setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam bertindak dan melaksanakan cara hidup yang baik yang telah dipilihnya. Ketidaksamaan ini menghendaki peranan pemerintah untuk mensiasatinya, agar tercapai kesamaan kesempatan dalam pilihan dan pencapaian tujuan hidup, untuk mewujudkan otonomi individu yang diinginkan. Sehingga, netralitas pemerintah menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.

Konsep kebebasan dan kesamaan yang dikemukakan liberalisme dan netralitas pemerintah dalam menghadapinya, menghasilkan pluralitas nilai yang dianut dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih dan mengejar tujuan hidupnya. Namun, konsep ini dibatasi oleh universalisme yang dikemukakan liberalisme. Meskipun banyak nilai yang dianut dalam masyarakat, diperlakukan secara sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, namun satu-satunya yang benar di mana pun dan kapan pun adalah nilai-nilai liberalisme yang menonjolkan konsep kebebasan dan kesamaan individu. Ada pemutlakan terhadap nilai-nilai liberalisme dalam masyarakat. Seolah-olah yang benar dan baik itu adalah yang menonjolkan nilai kebebasan dan kesamaan.

Komunitarianisme yang muncul sebagai kritik terhadap liberalisme sebenarnya dapat dianggap sebagai perspektif yang lain dalam filsafat politik. Mereka tidak hanya sekedar kritik terhadap liberalisme tapi juga memiliki nilai-nilai sendiri. Nilai-nilai yang mereka miliki adalah menjadikan komunitas sebagai fokus dan subjek perhatian. Komunitas sebagai tempat keterikatan dan ketertanaman individu harus diperhatikan. Jika pertumbuhan dan perkembangan komunitas diperhatikan otomatis individu-individu yang menjadi anggotanya juga akan diperhatikan.

Individu bukan satu diri yang atomistik dan transenden, tetapi realitas yang hidup bersama dengan yang lain. Karenanya, harus memperhatikan dan peduli dengan individu-individu yang lain. Sehingga akan menimbulkan solidaritas dan sensitifitas terhadap keberadaan yang lain dalam komunitas. Namun, konsep seperti ini juga dapat mereduksi individu-individu yang menjadi anggotanya. Kebebasan dan nilai yang dianut individu harus merujuk atau sesuai dengan kebaikan bersama. Meskipun nilai tersebut tidak diinginkan dan disukai atau bahkan meniadakan kebebasan individu dalam komunitas. Tidak ada otonomi individu dalam komunitas, semua kebijakan ditentukan atas dasar kebaikan bersama, atas kesepakatan yang dianut dalam komunitas.

Intervensi pemerintah, dalam bentuk dukungan atau pengabaian, terhadap nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, di satu sisi dapat menjamin bahwa semua nilai akan berkembang dengan baik. Nilai-nilai hidup yang maju akan tetap maju dan diminati. Nilai-nilai yang sebelumnya tidak berkembang dan kurang diminati dengan perhatian dan bantuan pemerintah, berupa pendanaan dan fasilitas untuk tumbuh dan berkembang, dapat memacu dirinya untuk menjadi berkembang. Namun, tindakan ini

justru akan mendiskriminasi nilai-nilai yang ada. Pilihan untuk mendukung salah satu nilai karena sesuai dengan kebaikan bersama dan mengabaikan nilai lain karena bertentangan dengan kebaikan bersama akan menghasilkan ketidakadilan. Tindakan intervensi terhadap nilai-nilai yang dianut ini juga menimbulkan ketidaktoleranan terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan kebaikan bersama. Karena komunitarianisme berpendapat bahwa nilai-nilai minoritas harus bergabung atau melebur kepada nilai-nilai bersama.

Pluralisme yang dianut oleh komunitarianisme juga dapat menghasilkan relativisme, karena kebenaran dari nilai-nilai yang ada sesuai dengan konteks masyarakat tempat nilai tersebut tumbuh dan berkembang. Sehingga, suatu nilai yang dianggap benar dan layak untuk dikejar menurut suatu masyarakat belum tentu demikian juga menurut masyarakat yang lain.

Akhirnya, liberalisme dan komunitarianisme berbeda karena memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menempatkan individu dan komunitas. Liberalisme menfokuskan perhatian kepada otonomi individu, tapi bukan berarti meniadakan komunitas. Yang menjadi perhatian adalah individu-individu yang menjadi anggota dari komunitas, dan komunitas tidak dapat mereduksi keberadaan dan kebebasan individu yang menjadi anggotanya. Di sisi lain, komunitarianisme memfokuskan perhatian kepada komunitas yang menjadi konteks dari keberadaan individu, tapi bukan berarti mengabaikan keberadaan individu itu sendiri. Individu justru dianggap akan otonom dan memiliki kebebasan dan kesamaan sesuai dengan nilai liberalisme jika komunitasnya juga otonom. Karenanya, kedua aliran dalam filsafat politik ini berbeda namun tidak mesti diletakkan secara oposisional.

Daftar Kepustakaan

- Hampton, Jean, 1997, *Political Philosophy*, Westview Press, Amerika Serikat
Kekes, John, 1997, *Against Liberalism*, Cornell University Press, N.York
Kymlicka, Will, 1992, *Liberalism, Community and Culture*, Clarendon Press, Oxford
-----, 1995, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford University Press, N York

- , "Community", 1996, dalam Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publisher Ltd, UK
- Mac Intyre, Alasdair., 1981, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, Duckworth, London
- Nozick, Robert, 1974, *Anarchy, State and Utopia*, Basil Blackwell, Oxford
- Rawls, John, 2001, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Amerika Serikat.
- Ryan, Alan, "Liberalism", 1996, dalam Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publisher Ltd, UK
- Sandel, Michael, "Morality and the Liberal Ideal", 1984, *New Republic*, 7 May 1984
- Taylor, Charles., 1985, *Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers. ii*, Cambridge University Press, Cambridge

